

MODEL PENUNTASAN WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN¹⁾

Oleh: Darmono²⁾ dan Hiryanto³⁾

Abstrak

Penelitian ini menitikberatkan pada upaya penuntasan wajar dikdas sembilan tahun dengan menawarkan sebuah model penelitian yang mengambil lokasi pada salah satu wilayah kecamatan di salah satu kabupaten di Indonesia yang masih termasuk rendah APK-nya yaitu di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kecamatan Karang Intan.

Obyek penelitian yaitu lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, formal maupun non formal, meliputi: (1) SD/MI, (2) SMP/MTs, (3) SMP Terbuka, (4) PKBM penyelenggara program Kejar Paket A dan B, (5) Ponpes penyelenggara wajar dikdas, dan (6) Anak yang belum/sedang/putus sekolah usia 6-15 tahun. Indikator penuntasan wajar dikdas (APK, APM, alus, anjut, angka absolut, dan lain-lain) di Kecamatan Karang Intan menarik untuk dilakukan penelitian guna mengejar ketertinggalannya dengan wilayah lain. Model penelitian yang dikembangkan mengacu pada empat komponen, yaitu: (1) pengorganisasian masyarakat, (2) pengembangan pendanaan, (3) program aksi, dan (4) evaluasi dan tindak lanjut. Data penelitian dikumpulkan dengan metode angket, *interview*, observasi, dan doku-mentasi. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan di seluruh wilayah Kecamatan Karang Intan terdapat: (1) 32 SD/MI baik itu negeri maupun swasta, (2) terdapat 4 desa (15,38%) yang tidak memiliki SD/MI, (3) terdapat 8 desa yang memiliki SD/MI lebih dari satu sekolah, dan (4) ada 14 desa yang masing-masing hanya terdapat 1 SD/MI. Untuk sarana pendidikan tingkat SLTP telah terdapat 2 SMP Negeri, 3 SSA Negeri, 1 SMP terbuka, dan 5 buah MTs baik negeri maupun swasta. Selain itu, juga terdapat PKBM pelaksana Kejar Paket A dan B sebanyak 6 buah dan Ponpes Mifthahussibiyah yang berpusat di Desa Mandi Kapau Timur dengan 6 cabang yang terletak di desa lain. Empat komponen model yang dikembangkan dalam PWDST semuanya dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan dari penerapan model PWDST ditandai dengan naiknya indikator penuntasan wajar dikdas, yaitu: (1) nilai APK tingkat SD dan yang sederajat termasuk Kejar Paket A sebesar 107% dan APM sebesar 88%, (2) angka melanjutkan tingkat SD dan yang sederajat sebesar 90%, (3) nilai APK tingkat SMP dan yang sederajat termasuk Kejar Paket B dan Ponpes penyelenggara Wajar Dikdas sebesar 96% dan APM-nya sebesar 62%.

Kata kunci: wajib belajar, dikdas 9 tahun, dan Kalsel.

¹⁾ Penelitian dibiayai melalui Dana Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2008 Rp 45.000.000,00

²⁾ Dosen Jurusan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

³⁾ Dosen Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

A. PENDAHULUAN

Dalam kerangka pembangunan nasional, mutu sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu modal dasar yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Belajar dari pengalaman negara-negara industri baru (*new emerging industrialized countries*) di Asia Timur, pembangunan suatu bangsa memerlukan *critical mass*, yaitu SDM dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung pembangunan (Anonim, 2006). Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar penduduk Indonesia memiliki tingkat pendidikan dan jenis keahlian tertentu untuk memenuhi *critical mass* tersebut.

Harapan dari sektor peningkatan kualitas SDM khususnya melalui jalur pendidikan di atas, ternyata bertolak belakang dengan realitas yang terjadi pada saat ini. Menurut data yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2003), menunjukkan bahwa jumlah anak usia 7-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan masih cukup tinggi sekitar 2,9 juta, angka putus sekolah cukup tinggi (tingkat SD/MI sebanyak 638.056 orang dan untuk SMP/MTs sebanyak 288.787 orang), angka mengulang kelas juga cukup tinggi yaitu tingkat SD/MI sebanyak 1.388.153 orang dan untuk SMP/MTs sebanyak 27.253 orang, serta mutu pendidikan dasar juga masih rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, program pembangunan pendidikan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama diprioritaskan pada penuntasan Program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun yang merupakan salah satu langkah strategis untuk membentuk *critical mass* tersebut. Melalui program tersebut, diharapkan terwujud masyarakat Indonesia yang minimal memiliki kemampuan dasar yang esensial. Kemampuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Dengan bekal kemampuan dasar yang baik, lulusan SMP dan yang sederajat diharapkan mampu memilih pendidikan lanjutan yang sesuai dengan potensi dirinya, mampu

melakukan interaksi dengan masyarakat maupun lingkungan di mana mereka berada, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian Wajar Dikdas 9 Tahun bukan semata-mata untuk pencapaian angka partisipasi dalam pendidikan, tetapi jauh lebih dari itu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu SDM Indonesia sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Oleh karena itu, yang harus dicapai oleh Wajar Dikdas 9 Tahun bukan sekedar tingginya angka partisipasi pendidikan dasar, akan tetapi pendidikan dasar yang bermutu baik.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun semakin mendesak, apalagi jika dikaitkan bahwa sejak 1 Januari 2003 Indonesia telah memasuki era AFTA dan AFLA serta akan disusul dengan APEC pada tahun 2010 (Anonim, 2006). Dalam era keterbukaan itu, Bangsa Indonesia harus siap berkompetisi dengan bangsa lain dalam berbagai bidang kehidupan sehingga penyiapan SDM yang bermutu baik merupakan hal yang sangat penting.

Wajar dikdas sembilan tahun ditujukan bagi anak Indonesia usia 7-15 tahun termasuk anak-anak dari keluarga kurang beruntung, daerah terpencil, daerah pasca konflik, daerah pasca bencana, anak-anak pada pemukiman kumuh, dan anak-anak penyandang cacat dengan memperhatikan kesetaraan gender. Ketika dicanangkan pada tahun 1994, Program Wajar Dikdas 9 Tahun diharapkan dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun, adanya krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan target tersebut tidak dapat tercapai. Target penuntasan Wajar akhirnya disesuaikan dari 2003/2004 menjadi 2008/2009.

Oleh karenanya, penelitian ini akan menfokuskan pada upaya penuntasan wajar dikdas sembilan tahun yang mengambil pada salah satu wilayah kecamatan di suatu kabupaten yang masih termasuk rendah APK-nya yaitu di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kecamatan Karang Intan yang pada tahun 2006 dimana: (1) APK tingkat SMP termasuk Kejar Paket B hanya 73,3%, (2) APK tingkat

SMP tidak termasuk Kejar Paket B sebesar 51,03%, (3) APM tingkat SMP termasuk Kejar Paket B termasuk hanya 62,00%, dan (4) APK tingkat SMP tidak termasuk Kejar Paket B baru mencapai 41,21%. Nilai-nilai tersebut masih berada bawah nilai rata-rata nasional pada tahun yang sama.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Anak *Drop-Out* Sekolah

Tidak diragukan lagi visi dan misi sekolah adalah untuk memberikan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada anak didiknya melalui proses edukatif dalam rangka membina sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, Biro Pusat Statistik (BPS, 1992) berdasar survei sosial melaporkan penduduk desa yang buta huruf pada usia 5 sampai dengan 29 tahun mencapai 19,17%. Hal ini disebabkan karena angka putus sekolah tingkat SD cukup tinggi. Banyak anak dalam kelompok usia sekolah karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka disebut putus sekolah (*drop-out*). Vembriarto (1977: 13) menerangkan putus sekolah dapat diartikan keluar dari sekolah formal sebelum berhasil menamatkan pelajarannya. Anak (anak) putus sekolah (*drop-out*) adalah bagian dari komunitas anak bangsa dan mereka itu bukanlah merupakan anak kelas dua di negara ini.

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi masalah serius berkaitan dengan masalah putus sekolah. Anak-anak di daerah tertinggal, anak-anak jalanan, anak-anak yang hidup dalam *broken home* adalah contoh dari mereka ini. Beberapa penelitian menjelaskan sebab-sebab *drop-out* antara lain faktor sosial ekonomi. Hasil penelitian Siagian (1988) menyebutkan di daerah perdesaan terdapat 78,6% jumlah penduduk buta huruf yang disebabkan karena sikap negatif terhadap sekolah.

Sikap negatif orang tua terhadap sekolah mempengaruhi terhadap prestasi anak-anaknya. Orang tua memiliki sikap negatif terhadap pendidikan akan menanamkan sikap yang sama pada anaknya. Hal ini akan mengakibatkan semangat belajar menurun, pada gilirannya prestasinya

rendah dan akhirnya *drop-out*. Jika sikap orang tua negatif, mereka mempunyai pengharapan yang tidak realistis terhadap sekolah. Artinya orang tua tidak peduli apa yang dipelajari di sekolah tetapi lebih memikirkan uang yang dihasilkan setelah tamat sekolah. Ivan Illich (1982: 45) menyebut uang lebih berharga daripada ijazah.

Keadaan *drop-out* adalah sesuatu yang tidak diharapkan karena membawa kerugian yang besar bagi anak, orang tua maupun masyarakat. Anak merasakan betapa pahitnya menjadi putus sekolah. Penelitian Wahyudi (1998) mengemukakan, kondisi anak *drop-out* sebagai berikut: (1) Timbul rasa kecewa dan berkembang ke patah semangat karena terpaksa keluar dari sekolah sebelum menamatkan pendidikannya, padahal masih ada kemauan untuk belajar. (2) Dapat menimbulkan kemerosotan moral karena ada kekosongan dalam diri anak, sehingga mudah berperilaku negatif untuk menutupi kelemahannya. (3) Mereka terancam menjadi buta huruf, walaupun mereka berusaha mengembangkan diri melalui latihan-latihan. Dijelaskan selanjutnya bahwa sebagian besar anak *drop-out* berasal dari desa-desa, pegunungan-pegunungan karena mereka segera bertanggung jawab secara sosial sebagai orang dewasa (hidup berumah tangga, ikut serta mencari nafkah). (4) Anak kurang mampu untuk mencapai kedewasaan sehingga kurang siap untuk berkeluarga, kurang pergaulan, dan tidak mandiri.

Ditinjau dari sudut keluarga, kondisi *drop-out* sangat merugikan bagi keluarga. Hasil penelitian Warsito (1999) mengemukakan antara lain: (1) Orang tua merasa kecewa karena anaknya tidak berhasil di bidang pendidikan. (2) *Drop-out* merupakan pemborosan keuangan keluarga walaupun untuk tingkat pendidikan dasar dinyatakan bebas biaya, namun kenyataannya sekolah tidak dapat berjalan tanpa bantuan keuangan dari keluarga. (3) Menambah beban berat keluarga karena anak tidak sekolah dan tidak pula bekerja memerlukan dana untuk menunjang kehidupan.

Masyarakat juga dirugikan karena banyaknya anak *drop-out*. Pertama, kondisi *drop-out* sebagian besar merupakan penyebab kenakalan anak. Kenakalan anak sangat merugikan masyarakat karena menjurus tindak kriminal. Kedua, kondisi *drop-out* menambah banyaknya angka

pengangguran. Karena menganggur biasanya anak mudah terseret ke perilaku negatif/maksiat, misalnya judi, mabuk, menodong, dan sebagainya. Ketiga, kondisi *drop-out* mengurangi partisipasi aktif anak dalam memajukan suatu wilayah/daerah, karena anak merasa minder. Akibatnya pembangunan suatu daerah sangat tertinggal. Apalagi sekarang zaman otonomi daerah (otoda), yang menekankan bahwa kemajuan suatu daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri.

2. Tantangan dan Strategi Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun

Gambaran umum mengenai pencapaian penuntasan wajar dikdas sembilan tahun hingga tahun 2005, APK SMP/MTs secara nasional telah mencapai 85,22.% dan rata-rata nilai ujian nasional (UNAS) sebesar 6,28 pada tahun pelajaran 2004/2005. Dengan pencapaian tersebut, berarti untuk menuntaskan wajar dikdas sembilan tahun pada tahun 2008/2009 dengan indikator APK SMP/MTs 95% diperlukan kenaikan APK sebesar 9,78%. Kenaikkan APK sebesar 9,78% tersebut dapat dicapai dengan penambahan layanan pendidikan bagi sekitar 1,9 juta anak usia pendidikan dasar yang belum memperoleh layanan pendidikan karena berbagai alasan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Depdiknas, 2006). Oleh karena itu, agar penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu baik, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas sehingga lebih dari 70% peserta UAN mencapai nilai rata-rata 6,0 pada tahun 2008/2009. Disamping itu, peningkatan kualitas juga dapat diarahkan agar 70 % sekolah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan benar serta 70% sekolah memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran dengan baik, kreatif, dan inovatif.

Untuk mencapai ketuntasan wajar dikdas 9 tahun dengan indikator APK SMP/MTs 95% dan 70% peserta UAN meraih nilai rata-rata 6.00, perlu disusun strategi, pentahapan, dan program penuntasan yang tepat dengan didasarkan pada kondisi obyektif pendidikan SMP saat ini,

tantangan-tantangan atau kendala-kendala lapangan yang dihadapi, dan potensi atau sumber daya yang tersedia.

Secara nasional sejumlah tantangan utama untuk penuntasan wajar dikdas sembilan tahun antara lain adalah sebagai berikut: (1) masih ada 1,9 juta anak usia 13-15 tahun belum tertampung, (2) APK SMP dari 118 kabupaten di bawah 75 %, (3) kondisi geografis yang sulit, (4) kemiskinan, (5) kesenjangan budaya dan kesetaraan gender, (6) peran pemda belum optimal, (7) peran perguruan tinggi perlu dioptimalkan, dan (8) sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai.

3. Strategi Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun

Memperhatikan target penuntasan wajar dikdas sembilan Tahun yang bermutu dan berbagai tantangan sebagaimana dikemukakan di atas terdapat beberapa tiga program yang selayaknya dilakukan, yaitu: perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan peningkatan mutu governance, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam pengelolaan pendidikan (Depdiknas, 2006).

Secara garis besar ketiga program tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut: (1) Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP, (2) Pembangunan Ruang Kelas Baru, (3) Subsidi Siswa, (4) Pembangunan SD-SMP Satu Atap, (5) SMP Terbuka, dan (6) Sosialisasi dan Kerjasama Penuntasan Wajib Belajar.

4. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Melalui Pondok Pesantren

Persoalan pendidikan di Indonesia tidak semudah yang dialami oleh negara-negara kecil di Asia. Permasalahan pendidikan di Indonesia sangat kompleks, artinya permasalahan pendidikan saling berkait dengan sistem kenegaraan (politis) yang dipicu oleh kondisi historis dan geografis. Kondisi ini menyebabkan sistem pemerintahan relatif berkembang secara instabilitas terhadap bentuk, pola maupun sistem dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa. Persoalan politis yang berpengaruh kepada pengembangan

pendidikan di Indonesia sekarang ini dirasakan pada sistem manajemen pendidikan. Tercatat, manajemen yang paling mula dalam konteks perkembangan pendidikan di Indonesia adalah pondok pesantren. Bentuk manajemen pondok ini hadir seiring dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bersifat paternalistik. Artinya, manajemen pendidikan yang mengacu kepada pemimpin lembaga/institusi pondok; seperti halnya raja sebagai *patronage* dan sekaligus rujukan oleh bawahannya (Hajar Pamadhi, 2005).

Manajemen pondok merupakan akumulasi pola pembelajaran agama Islam dengan keterampilan teknis, dan mengangkat kyai sebagai *patronage* (rujukan) institusi. Oleh karenanya, kyai merupakan sumber dan pusat ilmu, segala putusan untuk hidup. Indikasi tersebut belum diketemukan sejarah yang tepat tentang alur sistem manajemen pondok yang berasal dari India (Hindu dan Budha) ataupun dari negeri sendiri. Namun, berdasarkan penuturan beberapa ahli (dugaan para ahli) manajemen santri atau pondok pesantren adalah olah pikir dari para Ustadz ketika berkembangnya kerajaan (Depag RI, 2003: 7).

Manajemen pondok merupakan manajemen pendidikan tradisional yang membentuk santri (siswa) berkepribadian menyeluruh antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Inti pembelajaran berupa: (1) penanaman kepribadian melalui pelajaran agama Islam (fiqih, tauhid, dan seterusnya), dan (2) keterampilan (*academic dan life skill*) yang terpadu (*integrated curriculum*) melalui pelajaran persiapan hidup untuk bekerja sesuai dengan profesi (belajar ilmu umum seperti sekolah apda umumnya). Pendidikan pondok telah mengenal belajar sepanjang hayat (*life long education*) yang diterapkan pendidikan itu dimulai sejak bangun tidur di pagi hari ketika membuka mata sampai mata telah tidak mampu lagi mengamati sekelilingnya. Pendidikan sepanjang masa diperkenalkan secara polos oleh para kyai tanpa mengenal lelah, dan dipolakan mulai dari cara bergaul bersosial sampai kehidupan

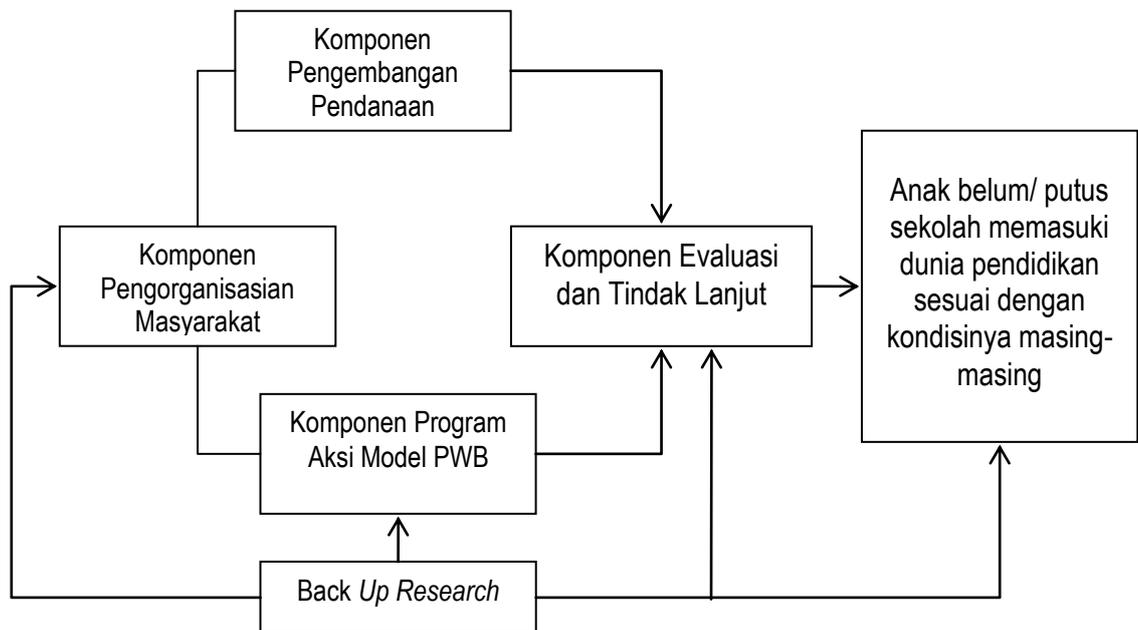
beragama. Dengan kata lain, pendidikan di pondok dapat memperkenalkan pendidikan fungsional sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang muncul pada manajemen pendidikan bergaya *patronage* atau paternalistik ini adalah ketergantungan dengan patronnya. Ketika dunia telah berubah dan pengetahuan telah melebar, beberapa pandangan tradisional dalam pondok sulit untuk dikembangkan karena ketergantungan dengan patron tersebut. Oleh sebab itu, objek sasar pada kelas *patronage* dapat diubah dengan pendekatan sosiokultural, memasukkan reformasi ke dalam alur berpikir para kyai dan memasukkan ke dalam wacana pembelajaran yang inklusif. Dengan demikian, pendekatan pemecahan dapat berangkat dari permasalahan yang mendasar dari pondok terhadap kemajuan ilmu dan pengetahuan, di antaranya adalah memberikan kesetaraan pondok terhadap pendidikan formal. Seperti telah diketahui, bahwa pondok pesantren saat ini telah mampu merangka persepsi kelompok marginal yang berada kelas bawah dan jika reformasi manajemen dapat berubah diprediksi akan mempengaruhi kinerja dan arah pondok.

Pendekatan sosio-kultural dalam penuntasan ini diartikan juga sebagai pendekatan naturalistik, karena pada hakikatnya pondok hadir atas inisiatif masyarakat untuk maju mendalami syariat Islam. Untuk menyiasati strategi ini dikembangkan pendekatan naturalistik dengan sentuhan kalbu bahwa. Belajar itu adalah ibadah?

4. Deskripsi Model

Desain model penuntasan waib belajar (PWB) dikdas sembilan tahun bagi anak yang belum/putus sekolah yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah mengacu kepada keempat komponen PWB, yang secara skematis dapat dilukiskan sebagai berikut.



Gambar 1. Model Penuntasan Wajib Belajar Dikdas Sembilan Tahun

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini pada tahun kedua (2008) menggunakan teknik pendekatan penelitian survei dan tindakan lapangan dengan didukung metode pengumpulan data melalui angket, *interview*, dan observasi. Penelitian ini bersifat uji coba pengembangan model. Oleh karena itu, data yang terkumpul secara serempak dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kecamatan Karang Intan yang beribu kota di Karang Intan terdiri dari 26 desa, yaitu desa: (1) Jingah Habang Hilir, (2) Jingah Habang Hulu, (3) Pandak Daun, (4) Mali–Mali, (5) Sungai Arpat, (6) Lok Tangga, (7) Pasar Lama, (8) Sungai Besar, (9) Bi-ih, (10) Balau, (11) Karang Intan, (12) Lihung, (13) Panyambaran, (14) Pandang Panjang, (15) Mandi Angin Barat, (16) Mandi Angin Timur, (17) Awang Bangkal Barat, (18) Awang Bangkal Timur, (19) Mandi Kapau Barat, (20) Mandi Kapau Timur, (21) Sungai Alang,

(22) Sungai Landas, (23) Sungai Asam, (24) Pulau Nyiur, (25) Abirau, dan (26) Kiram. Ke-26 desa tersebut terdiri dari 76 Rukun Tetangga (RT/Kampung).

Hasil penelitian menunjukkan di seluruh wilayah Kecamatan Karang Intan terdapat: (1) 32 SD/MI baik itu negeri maupun swasta, (2) terdapat 4 desa (15,38%) yang tidak memiliki SD/MI, (3) terdapat 8 desa yang memiliki SD/MI lebih dari satu sekolah, dan (4) ada 14 desa yang masing-masing hanya terdapat 1 SD/MI. Untuk sarana pendidikan tingkat SLTP telah terdapat 2 SMP Negeri, 3 SSA Negeri, 1 SMP terbuka, dan 5 buah MTs baik negeri maupun swasta. Selain itu, masih terdapat tambahan dukungan sarana dan prasarana percepatan penuntasan wajar dikdas sembilan tahun yaitu berupa PKBM pelaksana Kejar Paket A dan B sebanyak 6 buah dan Pondok Pesantren Mifthahussibiyah yang berpusat di Desa Mandi Kapau Timur yang memiliki 6 cabang (unit) yang terletak di lain desa. Empat komponen model yang dikembangkan dalam PWDST semuanya dapat berjalan dengan baik.

Keberhasilan dari penerapan model PWDST ditandai dengan naiknya indikator penuntasan wajar dikdas, yaitu: (1) nilai APK tingkat SD dan yang sederajat termasuk Kejar Paket A telah mencapai 107% dan APM sebesar 88%, (2) angka melanjutkan tingkat SD dan yang sederajat sebesar 90%, (3) nilai APK tingkat SMP dan yang sederajat termasuk Kejar Paket B dan Ponpes Penyelenggara Wajar Dikdas telah melampaui target rata-rata nasional pada tahun 2008 ini yaitu 96% dan APM-nya sebesar 62%.

2. Pembahasan

a. Pemantapan Komponen Organisasi Model PWDST

Hasil evaluasi melalui 130 angket yang disampaikan ke masyarakat, menunjukkan bahwa di seluruh wilayah Kecamatan Karang Intan yang terdiri dari 26 desa untuk uji coba model program PWDST, kondisi perjalanan

pengorganisasian PWDST yang memberikan penilaian dalam kategori sangat baik sebanyak 16 orang (17,64%), kondisi baik sebanyak 84 orang (64,62%), kondisi cukup baik sebanyak 18 orang (13,85%), dan kondisi kurang baik sebanyak 5 orang (3,85%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa organisasi PWDST bagi ABSPS di 26 desa uji coba model sudah berjalan dengan kondisi yang baik.

Dilihat dari kedinamisan organisasi dan jumlah anak yang berpartisipasi dalam program PWDST, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengorganisasian PWDST yang dilakukan masyarakat cukup efektif. Hal itu nampak dari nilai tolok ukur/indikator keberhasilan PWDST khususnya yang terkait langsung dengan jumlah anak yang pada tahun pertama penelitian (2007) tingkat partisipasi aktif sebagai peserta didik masih rendah, namun pada tahun kedua penelitian (2008) telah dapat menaikkan nilai indikator keberhasilan PWDST tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komponen organisasi PWDST dapat berjalan baik dan memerankan fungsinya dengan baik dan efektif.

b. Komponen Pengembangan Pendanaan Program PWDST

Pada penelitian tahun kedua (2008), telah dilakukan berbagai penyuluhan mengenai penggalan sumber dana untuk kelancaran program PWDST ini. Mereka dilatih melakukan penggalan dan pengelolaan dana secara terbuka dan membiasakan diri untuk memanfaatkan sumber daya alam khususnya perkebunan karet dan partisipasi dari orang tua/wali siswa. Pola ini dimaksudkan sekaligus sebagai upaya pengembangan budaya meningkatkan etos kerja di kalangan masyarakat yang pada umumnya kurang.

Sistem penggalan dana untuk setiap desa ternyata cukup bervariasi dalam mengadakan penggalan dana untuk menunjang kelancaran program PWDST di desanya. Berbagai variasi tersebut di antaranya: (1) donatur sukarela anak/orang tua wali, dan (2) Teknik penggalan dana untuk pendukung kelancaran program PWDST di 26 desa wilayah penelitian semuanya dapat berjalan dengan baik, meskipun tidak sama mekanismenya.

c. Komponen Program Aksi Model PWDST di Pedesaan

Sebagaimana telah dilaporkan pada hasil penelitian tahun kedua (2008), untuk memandirikan para ABSPS agar mereka tetap bersekolah, mereka perlu diberikan pemahaman khususnya arti pentingnya pendidikan bagi masa depannya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Bagi mereka yang memasuki sekolah formal seperti SMP, MTs, SMP Terbuka, pelajarannya mengikuti kurikulum yang berlaku. Namun, bagi yang mengikuti pelajaran di Kejar Paket A dan Paket B yang dikelola PKBM atau yang mengikuti pelajaran di Ponpes memang masih banyak kendala yang dihadapi. Pelajaran umum masih terbatas pada mata pelajaran yang pokok khususnya Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, dan ditambah Bahasa Inggris.

d. Komponen Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pola evaluasi dan tindak lanjut program PWDST yang dikembangkan oleh masyarakat adalah: (1) pertemuan berkala setiap satu setengah bulan sekali di tingkat kecamatan dalam bentuk Forum Komunikasi dan Konsultasi Kegiatan PWDST. Forum ini diikuti oleh Satgas PWDST tingkat kecamatan, dan dihadiri perangkat desa dan para kepala sekolah, dan (2) pertemuan rutin/bulanan di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Satgas PWDST. Forum ini sekaligus juga digunakan sebagai wahana pembinaan dan monitoring program PWDST di tiap desa.

Berdasarkan pengamatan dan hasil evaluasi pada tahun kedua (2008), diketahui bahwa mekanisme pertemuan sudah berjalan cukup baik. Hanya saja di tingkat desa peran pemerintah desa masih cukup dominan, artinya ketergantungan terhadap para Kepala Desa (Pembakal) masih tinggi. Sedangkan di tingkat RT kelemahan terletak pada fungsionaris RT, mereka sebagian menganggap bahwa dengan masuknya program PWDST hanya akan menambah beban tugas bagi perangkat RT. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme evaluasi dan tindak lanjut yang merupakan komponen keempat dari model PWDST telah berjalan dengan baik.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Empat komponen model PWDST yang dikembangkan dalam penelitian khususnya: (1) pengorganisasian masyarakat, (2) pengembangan pendanaan, (3) program aksi model, dan (4) evaluasi dan tindak lanjut telah dijalankan oleh masyarakat dengan baik.
- b. Efektivitas pengembangan model dalam rangka partisipasi masyarakat dalam usaha PWDST di wilayah Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar khususnya bagi ABSPS telah dilakukan oleh masyarakat setempat dengan baik sehingga berdampak sangat positif terhadap pemerintah setempat dan masyarakat setempat.
- c. Model program PWDST dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu alternatif penanganan kesenjangan pendidikan dasar sembilan tahun di daerah lain yang mempunyai karakteristik yang hampir atau mendekati sama dengan wilayah penelitian ini. Model ini dalam beberapa hal mampu mendorong masyarakat lebih mandiri dalam mengatasi persoalan pendidikan pada masyarakat di pedesaan.
- d. Keberhasilan dari penerapan model PWDST di wilayah Kecamatan Karang Intan telah dapat menaikkan indikator penuntasan wajib belajar sebagai berikut: (1) nilai APK tingkat SD dan yang sederajat termasuk Kejar Paket A sebesar 107% dan APM sebesar 88%, (2) angka melanjutkan tingkat SD dan yang sederajat sebesar 90%, (3) nilai APK tingkat SMP dan yang sederajat termasuk Kejar Paket B dan Ponpes Penyelenggara Wajar Dikdas sebesar 96% dan APM-nya sebesar 62%.
- e. Walaupun secara kuantitatif nilai rata-rata APK tingkat SMP dan yang sederajat telah melampaui target nasional, namun masih terdapat beberapa desa ersebut yang nilai APK-nya masih di bawah target nasional. Untuk itu, peran para Satgas di wilayah yang bersangkutan perlu bekerja keras dan bekerjasama dengan instansi terkait dan orang tua/wali siswa untuk memberikan pengertian kepada para anak usia sekolah yang pada saat ini belum memasuki dan melanjutkan sekolah.

2. Saran-saran

Beberapa saran berdasar dari hasil kegiatan penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) peran dan pemantapan para Satgas di tingkat kecamatan dan desa perlu ditingkatkan, (2) peran dan dukungan dari instansi terkait (pemerintah desa, kecamatan, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan/UPTD, PKBM, Pondok Pesantren, serta organisasi pemerintah dan sosial desa) sangat diharapkan agar target program PWDST di wilayah penelitian secara keseluruhan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan bagi semua pihak, (3) Bagi para anak usia sekolah tingkat SD dan SMP dan yang sederajat yang belum bersekolah, sedapat mungkin memasuki sekolah baik ke sekolah formal (SD, MI, SMP, SMP Terbuka maupun MTs) maupun sekolah informal seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B, maupun Pondok Pesantren penyelenggara wajar dikdas sembilan tahun yang ada di wilayah tersebut, (4) bagi orang tua/wali, tingkatkan peranmya untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada para putranya untuk memasuki sekolah, dan (5) Bagi pemerintah dan instansi terkait pemberian program penguatan merupakan salah satu alternatif untuk mempertahankan para anak yang pada saat ini telah memasuki pendidikan dan usaha untuk menarik para anak yang masih belum bersekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada: (1) Dirjen Dikti dan Direktur DP2M beserta staf, (2) Ketua Lemlit UNY beserta staf, (3) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Camat Karang Intan, para Kepala Desa (Pembakal), Satgas wajar dikdas, Kepala Sekolah, pengasuh Pondok Pesantren, Pengelola PKBM, para orang tua/wali siswa, dan para siswa SD/MI/SMP/MTs, dan para santri di seluruh wilayah Kecamatan Karang Intan yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Coombs, PH. (1973). **New Part to Learning for Rural Children and Youth: Non Formal Education for Rural Development**. New York: IECD.
- Depag. (2004). **Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah**. Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI.
- Depdiknas. (2006). **Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas.
- _____. (2006). **Informasi Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas.
- _____. (2006a). **Panduan Pembekalan Calon Peserta KKN Wajib Belajar Sembilan Tahun**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. (2006b). **Informasi Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. (2006c). **Panduan Pendataan dan Pemetaan dalam Rangka Menunjang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. (2006d). **Panduan Pemilihan Pola/Satuan Pendidikan dalam Rangka Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. (2006e). **Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
- Hajar Pamadhi. (2005). **Penuntasan Wajar 9 Tahun pendidikan Dasar di Pondok Pesantren (Suatu Kajian Politis-Kultural)**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
- Ivan Illich. (1982). **Bebas dari Sekolah**. Terjemahan oleh C. Woekirsari. Jakarta: Sinar Harapan.

- Kerlinger, Fred N. (1986). **Foundation of Behavioral Research**. Third Edition Holt, Rinehart & Winston.
- Karim dan Saleh Sugiyanto. (1976). **Menampung Anak Usia Sekolah: Antara Target dan Kemampuan**, "Prisma" No. 2 Th. V. Jakarta: LP3S.
- Kartini Kartono. (1990). **Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)**. Bandung: Mandar Maju.
- Monks, Knoer dan St. R. Haditono. (1999). **Psikologi Perkembangan**. Yogya-karta: Gadjah Mada University Press.
- Muller, Johannes. (1980). **Pendidikan Sebagai Jalan Pembebasan dari Cengkeraman Kemelaratan**. Prisma No. 7 Th. IX. Jakarta. LP3S.
- Mubyarto. (1991). **Etos Kerja dan Kohesi Sosial**. Yogyakarta: Aditya Media.
- Richard Beckhard, (1987). **The Program for Specialis in Organization Training and Development Institute**. Insititute for Applied Behaviour Science.
- Spradley, James P. (1980). **Participant Observation**. USA Holt Reinhart and Winston.